

DIPLOMASI INDONESIA DALAM Mendukung Penanganan Pandemi Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19

¹Nurma Nengsi, ²Anggy Wira Pambudi

¹Program Magister Hubungan Internasional, Universitas Paramadina

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Jenderal Soedirman

Email: ¹nurmanengsi731@gmail.com; ²wiranggyakademik@gmail.com

ABSTRAK

Penyebaran virus Covid-19 telah menimbulkan berbagai dampak korban jiwa dan dampak pada sektor ekonomi. Penelitian ini berfokus pada praktik diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Dengan menggunakan *middle power diplomacy* dan *global health diplomacy*, peneliti mengkaji praktik diplomasi yang dilakukan Indonesia pada masa pandemi Covid-19 untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia melalui praktik diplomasi. Penelitian ini menemukan bahwa praktik diplomasi yang dilakukan Indonesia telah berhasil membentuk kerja sama untuk memenuhi berbagai kebutuhan guna mendukung penanganan pandemi dan pemulihan perekonomian nasional. Sebagai negara yang berstatus *middle power country*, praktik diplomasi Indonesia dilakukan secara fleksibel, baik di tingkat bilateral maupun multilateral dengan berbagai mitra untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.

Kata Kunci: Diplomasi, Indonesia, Pandemi Virus Covid-19, Bilateral, Multilateral

ABSTRACT

The spread of the Covid-19 virus has caused various impacts such as fatalities and impacts on economic sector. This study focuses on the diplomatic practices that were carried out by the Indonesian government to support the handling of the pandemic and the recovery of the national economy after the Covid-19 pandemic. By using middle power diplomacy and global

health diplomacy, this study examines diplomatic practices carried out by Indonesia during the Covid-19 pandemic to realize Indonesia's national interests through diplomatic practices. This research finds that the diplomatic practices have succeeded in forming cooperation to meet various needs to support the handling of the pandemic and the recovery of the national economy. As a country with the status of a middle power country, Indonesia's diplomatic practices can be carried out flexibly both at the bilateral and multilateral levels with various partners to realize Indonesia national interest.

Keywords: *Diplomacy, Indonesia, Covid-19 Virus Pandemic, Bilateral, Multilateral*

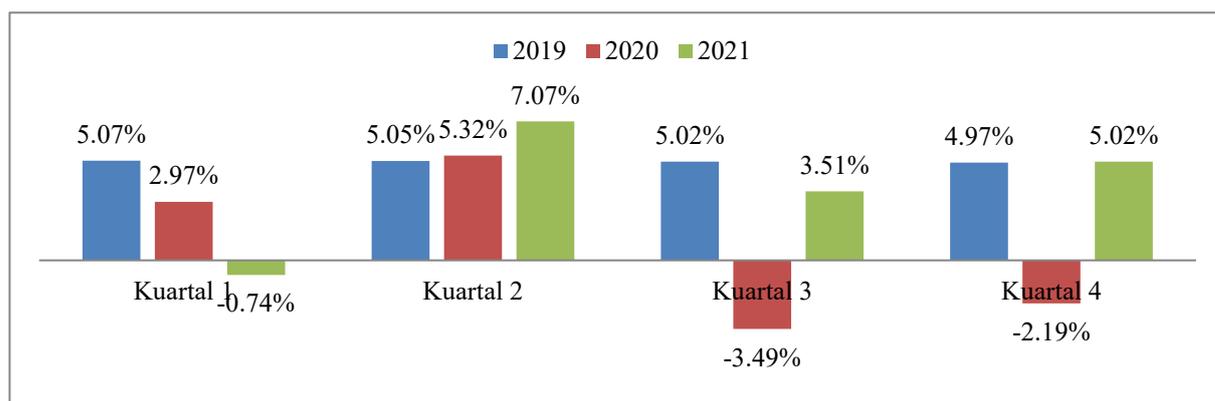
Pendahuluan

Dunia dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga pada tahun 2022, dimana beberapa negara telah menyatakan masa pandemi telah berakhir namun masih terdapat negara yang menetapkan masa darurat pandemi disebabkan penyebaran virus yang masih berlangsung dan menimbulkan dampak pada berbagai sektor. Penyebaran Covid-19 pertama kali ditemukan pada tahun 2020, namun tidak ada kejelasan tentang penemuan kasus pertama infeksi virus Covid-19. Adanya dugaan bahwa penyebaran virus terjadi akibat mobilitas migrasi antar negara, sehingga membuat virus Covid-19 dengan cepat menyebar ke berbagai negara.

Penyebaran virus Covid-19 terus berkembang hingga menimbulkan korban jiwa dan banyak negara mengalami kerugian, sehingga mendorong World Health Organization (WHO) untuk menetapkan status penyebaran virus Covid-19 sebagai pandemi global (Ducharme. 2020). Dengan adanya penetapan status penyebaran Covid-19 sebagai suatu pandemi yang bersifat global, diharapkan dapat mendorong atensi dan penanganan intensif terhadap penyebaran virus Covid-19, penanganan berbagai kasus infeksi virus, serta penanggulangan berbagai bentuk dampak yang ditimbulkan akibat pandemi virus Covid-19.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi tempat penyebaran pandemi Covid-19. Kasus pertama infeksi Covid-19 di Indonesia ditemukan pada salah satu warga di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, setelah sebelumnya berinteraksi dengan Warga Negara Asing yang datang berkunjung (Ihsanuddin. 2020). Penemuan kasus pertama

tersebut menjadi awal dari penemuan berbagai kasus infeksi virus Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia. Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia tergolong masif dapat terlihat dari tingkat penularan yang tinggi dan banyaknya korban jiwa akibat terinfeksi virus Covid-19. Penyebaran virus juga menimbulkan dampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah sektor perekonomian.



Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2020-2021

Berdasarkan Perbandingan Year on Year (yoy)

Sumber: Berbagai Sumber

Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor perekonomian Indonesia, salah satunya dapat terlihat dari penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai mengalami penurunan sejak ditemukannya kasus pertama infeksi virus Covid-19 pada awal tahun 2020. Apabila dilihat dengan perbandingan secara tahunan (Year on Year), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 yang mengalami pertumbuhan fluktuatif dan bahkan dalam beberapa kuartal mengalami pertumbuhan minus. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak segera membaik, maka Indonesia berpotensi mengalami resesi ekonomi, yang kemudian akan menghambat upaya Indonesia dalam memulihkan kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Dengan adanya penyebaran virus yang masif, korban yang terus meningkat dan dampak yang ditimbulkan, pemerintah Indonesia menetapkan penyebaran virus Covid-

19 sebagai bencana nasional non-alam, dimana penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (BNPB, 2020). Penetapan status penyebaran pandemi virus Covid-19 sebagai bencana nasional, salah satunya bertujuan untuk membantu penanganan penyebaran virus Covid-19 secara komprehensif.

Dalam upaya mendukung penanganan penyebaran virus Covid-19, serta dalam rangka penanggulangan dampak yang ditimbulkan, pemerintah Indonesia turut melakukan praktik diplomasi, baik dalam ranah multilateral maupun bilateral. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua, politik luar negeri Indonesia memprioritaskan beberapa agenda yang diterjemahkan dari visi dan misi Presiden Joko Widodo yaitu (1) menjaga kedaulatan Indonesia, (2) meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum, dan (3) meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia (Humas, 2015).

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka penelitian ini berupaya untuk mengkaji praktik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 serta dalam upaya pemulihan perekonomian nasional Indonesia pasca pandemi Covid-19. Penggunaan diplomasi sebagai sarana untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan perekonomian nasional Indonesia pasca terdampak pandemi dilakukan atas dasar keterbatasan kemampuan dalam negeri. Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan masalah "Bagaimana praktik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung penanganan virus Covid-19, beserta penanggulangan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian nasional Indonesia?". Penelitian dilakukan dengan pembatasan periode penelitian yakni tahun 2020-2022 dimana periode tersebut merupakan periode penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian. Menurut Moleong (2007:6), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia sebagai pihak yang harus melakukan upaya penanganan penyebaran virus Covid-19 dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19, khususnya pada sektor perekonomian. Untuk mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi pustaka dengan menggunakan beberapa sumber data kualitatif seperti buku, jurnal, dan artikel.

George dalam Djiwandono (2015:201), mendefinisikan studi pustaka sebagai upaya pengumpulan data dengan melakukan pencarian berbagai sumber informasi atau pendapat pakar terkait dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, dan artikel yang memiliki relevansi dengan topik dan kebutuhan penelitian. Setelah data penelitian berhasil didapatkan, peneliti kemudian melakukan triangulasi data untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan merupakan data yang memiliki keabsahan. Triangulasi data dilakukan dengan melakukan uji kebenaran data yang telah didapatkan dengan menggunakan referensi lainnya, sehingga kebenaran data tersebut dapat teruji dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setelah proses triangulasi data dilakukan, kemudian data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif agar didapatkan informasi atau data yang bersifat jenuh untuk digunakan dalam penelitian.

Kerangka Teoritis

Diplomasi Kekuatan Menengah

Salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Diplomasi Kekuatan Menengah (*Middle Power Diplomacy*). Kemunculan diplomasi kekuatan menengah dapat diidentifikasi dalam tiga gelombang yaitu (1) tatanan global pasca-1945, dengan fokus pada multilateralisme melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan terkait, (2)

kemunculan aktivisme *ad hoc* terkait isu tertentu, dan (3) secara kontras terbentuk dalam pelebagaan informal terkait G20 (Cooper & Dal, 2016:516). Definisi diplomasi kekuatan menengah menurut Triwibowo & Martha (2021) merupakan karakter kebijakan luar negeri dari negara-negara yang dikelompokkan kedalam kelompok kekuatan menengah (*middle power*) yang posisinya berada di antara kelompok negara berkekuatan besar (*major power*) dan kelompok berkekuatan kecil (*small states*).

Pengelompokan negara-negara kedalam kelompok kekuatan menengah dilakukan berdasarkan pengukuran kekuatan, kapasitas, dan pengaruh dari negara tersebut yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil dalam ruang lingkup internasional. Selain itu, negara yang dikelompokkan sebagai negara berkekuatan menengah cenderung menunjukkan dukungan terhadap stabilitas sistem dunia (Jordaan, 2003:165). Lebih lanjut, negara dengan kekuatan menengah memiliki kecenderungan untuk mengejar solusi multilateral atas permasalahan internasional, cenderung untuk mengupayakan kompromi dalam permasalahan internasional, dan cenderung untuk merangkul gagasan “kewarganegaraan global yang baik” untuk memandu diplomasi mereka (Cooper dkk, 1993:19). Perilaku negara yang dikelompokkan dalam negara kekuatan menengah cenderung mencari posisi aman dan menghindari konfrontasi dengan negara berkekuatan besar yang berisiko, namun posisi aman tersebut memberikan keleluasaan bagi negara kekuatan menengah dalam melakukan diplomasi.

Dalam penelitian ini, teori Diplomasi Kekuatan Menengah digunakan untuk menjelaskan praktik diplomasi Indonesia dalam ranah multilateral untuk membangun kesadaran dan solidaritas global terkait penanganan pandemi Covid-19. Negara kekuatan menengah disediakan ruang politik untuk memproyeksikan visi dunia yang mereka miliki dalam panggung global, sekaligus menunjukkan komitmen mereka untuk perdamaian dan stabilitas serta memperkuat citra tanggung jawab dan “kewarganegaraan global” mereka (Schoeman, 2003:351). Ranah multilateral merupakan salah satu panggung politik yang tersedia untuk negara kekuatan menengah. Kecenderungan negara kekuatan menengah dalam mengkonsentrasikan aktivitas mereka dalam ranah multilateral sering dikaitkan dengan upaya untuk membentuk inisiasi yang ditujukan untuk membentuk

koalisi dengan negara-negara yang sepeham dengan mereka (Higgot & Copper, 1990; Lovbraek, 1990).

Disisi lain, negara cenderung bergabung dengan koalisi kekuatan menengah karena hubungan simetris yang diharapkan untuk menentukan interaksi di antara sekutu yang berpikiran sama dan sangat kontras dengan hubungan dominasi yang lazim dalam koalisi kekuatan besar (Lee, 1999:21). Diplomasi Kekuatan Menengah digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan keaktifan Indonesia sebagai negara kekuatan menengah dalam melakukan praktik diplomasi dalam ranah multilateral untuk mengamankan kepentingan nasionalnya, dalam hal ini adalah untuk mendukung penanganan pandemi virus Covid-19 beserta penanggulangan dampak yang ditimbulkan pada sektor.

Diplomasi Kesehatan Global

Penelitian ini juga menggunakan teori Diplomasi Kesehatan Global. Ketidakmampuan negara dalam melakukan penanganan permasalahan kesehatan seperti pandemi Covid-19 mendorong negara-negara untuk meminta bantuan kepada pihak lainnya melau praktik Diplomasi Kesehatan Global. Hal ini dilakukan guna mendapatkan bantuan teknis dan non-teknis untuk mendukung penanganan permasalahan kesehatan. Diplomasi Kesehatan Global adalah aktivitas diplomatik terkait isu-isu kesehatan global dan mengkaji pengaruh isu-isu tersebut terhadap kebijakan luar negeri. Aktor dalam Diplomasi Kesehatan Global mencakup delegasi negara, kombinasi aktor pemerintah dan non-pemerintah yang mengadakan negosiasi secara bilateral atau multilateral terkait masalah kesehatan (Michaud & Kates, 2013:24).

Diplomasi Kesehatan Global mencakup berbagai isu kesehatan dan determinan kesehatan dimana isu tersebut melampaui batas negara dan membutuhkan tindakan kolektif. Isu kesehatan menjadi elemen penting dalam kebijakan luar negeri, keamanan, dan perdagangan, Diplomasi Kesehatan Global terbagi kedalam tujuh dimensi diantaranya adalah: (Kickbush & Liu, 2022:2156-2157)

1. Negosiasi untuk mempromosikan kesehatan dalam menghadapi kepentingan lain
2. Membangun mekanisme tata kelola baru dalam mendukung kesehatan
3. Menciptakan aliansi untuk mendukung hasil kesehatan

4. Membangun dan mengelola hubungan donor dan pemangku kepentingan
5. Menanggapi krisis kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan hubungan antar negara melalui kesehatan
7. Berkontribusi pada perdamaian dan keamanan

Untuk menjadikan suatu permasalahan kesehatan sebagai permasalahan kesehatan global, permasalahan tersebut harus melampaui kemampuan negara beserta dampak yang ditimbulkan serta melintasi batas negara, sehingga dibutuhkan peran partisipatif pihak lain seperti aktor pemerintah dan non-pemerintah yang dilakukan baik secara bilateral atau multilateral. Beberapa contoh permasalahan kesehatan yang menjadi permasalahan kesehatan global diantaranya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) yang menjadi epidemi global pertama pada abad ke-21, Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang dapat menyebabkan Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), dan Coronavirus Disease (COVID-19). Permasalahan kesehatan seperti SARS, HIV/AIDS dan virus Covid-19 merupakan permasalahan kesehatan yang bersifat global, dimana permasalahan kesehatan tersebut memiliki penyebaran yang telah melewati batas negara. Selain itu timbulnya dampak yang signifikan bagi banyak negara sehingga membutuhkan penanganan secara kolektif, baik melalui upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan.

Dalam penelitian ini, Diplomasi Kesehatan Global digunakan untuk menjelaskan praktik diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk membangun kesadaran global guna membentuk tata kelola penanganan pandemi, serta membangun solidaritas global dalam penanganan pandemi Covid-19. Keaktifan Indonesia dalam pembentukan tata kelola penanganan pandemi dari tahap inisiasi hingga pembentukan, tidak hanya bermanfaat untuk mendukung penanganan pandemi beserta dampak yang ditimbulkan, namun juga bermanfaat bagi Indonesia secara politis sebagai negara yang berada dalam kelompok negara kekuatan menengah.

Hasil dan Pembahasan

Arah Diplomasi Indonesia di Masa Pandemi Covid-19

Adanya pandemi Covid-19 turut menghadirkan disrupsi pada arah diplomasi Indonesia, sehingga diplomasi Indonesia dituntut untuk bisa adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Sejak tahun 2020, terjadi *refocusing* pada prioritas diplomasi Indonesia menjadi penguatan perlindungan Warga Negara Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap penanggulangan pandemi dari berbagai aspek dan Indonesia dapat terus berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dunia (Kemlu, 2021).

Diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mendapatkan berbagai bentuk bantuan yang dibutuhkan untuk mendukung penanggulangan pandemi Covid-19, seperti vaksin, alat kesehatan, dan bantuan medis lainnya. Hal ini dilakukan akibat adanya keterbatasan kemampuan industri kesehatan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, praktik diplomasi -khususnya diplomasi kesehatan, menjadi sarana Indonesia untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut yang berasal dari negara-negara lain maupun dari lembaga internasional melalui mekanisme kerja sama atau hibah. Indonesia menjadi lebih terbuka untuk melakukan kerja sama dengan pihak manapun guna mengamankan pasokan vaksin nasional dalam jangka pendek. Indonesia juga menjalin kerja sama dalam pengembangan vaksin guna mengamankan pasokan vaksin dalam jangka panjang. Selain itu, keterbukaan tersebut dilakukan guna mengakomodasi berbagai bentuk terobosan inovatif (Kominfo, 2021).

Dalam pelaksanaan diplomasi untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri Kesehatan sejak awal masa pandemi untuk melakukan diplomasi kesehatan guna membuka akses vaksin guna memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri (Lemhannas, 2021). Selain untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, diplomasi Indonesia juga diarahkan untuk mendukung penanggulangan dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, di antaranya dampak yang ditimbulkan pada sektor ekonomi.

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca terdampak pandemi, selain menggunakan program penguatan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah,

Indonesia membutuhkan kerja sama internasional, baik kerja sama multilateral maupun regional untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi (Widjanarko, 2020).

Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19

Sejak ditemukan pada awal tahun 2020, perkembangan tingkat penularan virus Covid-19 tergolong tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah rendahnya kesadaran pencegahan dan penanggulangan penularan virus Covid-19 di berbagai negara. Pada mulanya, banyak pemerintah berbagai negara yang abai dan bahkan berpandangan skeptisisme terhadap keberadaan virus Covid-19. Hal ini membuat tingkat penularan virus Covid-19 menjadi tinggi dan penularan virus tidak hanya terjadi pada satu negara, namun juga melintasi batas negara melalui aktivitas migrasi yang dilakukan oleh para migran dan wisatawan ke berbagai negara.

Berbagai upaya dilakukan untuk membentuk kesadaran dan kewaspadaan dunia terhadap virus Covid-19, salah satunya dilakukan oleh Indonesia dengan memanfaatkan forum internasional. Dalam pertemuan Menteri Kesehatan antar negara anggota ASEAN, Indonesia sebagai Ketua Badan Sektoral Kesehatan ASEAN berhasil mendorong adopsi pernyataan bersama tentang respon kolektif penanganan Covid-19 yang memuat komitmen pertukaran data dan informasi perkembangan virus Covid-19, koordinasi pelacakan dan penyelidikan kasus, serta peningkatan kapasitas penyediaan obat dan alat kesehatan (Kemenkes, 2020).

Indonesia sebagai Ketua forum Foreign Policy and Global Health (FPGH) yang beranggotakan Menteri Kesehatan Brasil, Perancis, Indonesia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan dan Thailand, juga berhasil mendorong adopsi pernyataan bersama yang memuat komitmen solidaritas dan kerja sama dalam kesiapsiagaan dan respon mengatasi pandemi COVID-19 (Rokom, 2021). Dalam pertemuan 25th Meeting of the ASEAN Coordinating Council yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengemukakan empat usulan terkait penanganan pandemi virus Covid-19 kepada negara-negara anggota ASEAN yaitu: (Kemlu, 2020).

1. Implementasi hasil-hasil pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN dan ASEAN Plus Three,
2. Komitmen untuk memastikan arus barang khususnya makanan, obat-obatan dan peralatan medis,
3. Perlindungan terhadap warga negara khususnya yang masuk kedalam kategori kelompok rentan,
4. Penjajakan penggunaan ASEAN Development Fund dan APT Cooperation Fund untuk membentuk ASEAN COVID-19 Response Fund.

Selain itu, Indonesia juga merupakan pihak yang mendorong diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus ASEAN dan KTT Khusus ASEAN Plus Three di masa pandemi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan komitmen ASEAN untuk tetap menanggapi pandemi secara efektif melalui berbagai bentuk pendekatan (Kemlu, 2020). Keaktifan Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk membentuk kesadaran dan kewaspadaan dunia terhadap ancaman virus Covid-19, merupakan upaya Indonesia untuk menunjukkan pengaruh Indonesia dalam kancah internasional. Indonesia menjadikan virus Covid-19 sebagai suatu permasalahan yang perlu untuk mendapatkan atensi bersama.

Dengan terbentuknya kesadaran dan kewaspadaan dunia terhadap ancaman virus Covid-19, diharapkan negara-negara dapat melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi virus Covid-19 baik secara individu maupun secara kolektif. Selain itu, keaktifan Indonesia dalam membentuk kesadaran dan kewaspadaan dunia terhadap ancaman virus Covid-19 melalui forum internasional sebagai upaya untuk menunjukkan “kewarganegaraan global yang baik” sekaligus merupakan upaya untuk menunjukkan kepemimpinan global Indonesia dengan menunjukkan keaktifan kontribusi dalam penanganan permasalahan pandemi Covid-19 yang merupakan permasalahan global.

Selain aktif dalam membentuk kesadaran dan kewaspadaan dunia terhadap virus Covid-19 melalui forum internasional, Indonesia juga aktif dalam melakukan diplomasi dalam berbagai tingkatan untuk membentuk kerja sama dan solidaritas global dalam

penanganan pandemi Covid-19. Pembentukan kerja sama dan solidaritas global menjadi penting untuk mendapatkan bantuan teknis & non teknis, obat-obatan, dan alat kesehatan yang digunakan untuk mendukung penanganan pandemi virus Covid-19 di Indonesia. Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan dalam berbagai tingkatan dan melibatkan berbagai mitra seperti negara dan lembaga internasional.

Pada tahun 2020, beberapa lembaga di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa seperti United Nations Development Programme (UNDP), World Health Organization (WHO) dan International Organization for Migration (IOM) turut serta memberikan bantuan alat kesehatan berupa ventilator yang disalurkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan guna mendukung penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia (WHO, 2020). Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah menyepakati kerja sama kemitraan pengadaan vaksin dan obat terjangkau dengan UNICEF, dimana kerja sama tersebut mengatur proses pengadaan barang dan jasa dari tahapan pengajuan, pembayaran hingga pengiriman barang sehingga dapat memperlancar arus barang (Karana, 2020).

Pada pertemuan virtual Extraordinary G20 Sherpa ke-2 yang diselenggarakan pada tahun 2020, Indonesia bersama dengan negara-negara anggota G20 lainnya menyepakati kerja sama dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan yang mudah diakses dan terjangkau, serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi global (Setyowati, 2020). Indonesia juga berhasil membentuk kerja sama kemitraan secara bilateral dengan berbagai negara guna mendapatkan bantuan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam pengadaan vaksin dimana Amerika Serikat menyepakati donasi vaksin Moderna sebesar 4 juta dosis vaksin serta bantuan medis dan alat kesehatan seperti oksigen guna membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia (Limanseto, 2021). Jepang juga merupakan mitra kerja sama Indonesia dimana pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mendapatkan hibah 998.400 dosis vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh perusahaan farmasi asal Jepang. Hibah tersebut merupakan hasil kerja sama bilateral

antara Indonesia dan Jepang yang dihasilkan dari komunikasi intensif Menteri Luar Negeri dari kedua negara (Kominfo, 2021).

Selain Amerika Serikat dan Jepang, China juga merupakan negara mitra Indonesia dimana China berkomitmen untuk memperkuat kerja sama pengadaan vaksin kepada Indonesia melalui perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac dan Sinopharm. Indonesia dan China juga menyetujui dilakukannya uji klinis, pembelian komersial, kerja sama produksi, dan transfer teknologi vaksin, serta kerja sama dalam rangkaian industri vaksin (Cindyara, 2021).

Posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah, memberikan Indonesia kemudahan dalam melakukan diplomasi kepada negara-negara dari kelompok berkekuatan besar, menengah ataupun kecil guna mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yang berusaha diwujudkan melalui praktik diplomasi yang dilakukan dalam lingkup bilateral atau multilateral. Melalui pembentukan kerja sama dan solidaritas global, Indonesia berhasil mendapatkan berbagai bentuk bantuan yang digunakan untuk mendukung upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Diplomasi Indonesia untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Penyebaran virus Covid-19 di Indonesia telah berdampak pada sektor perekonomian nasional disebabkan banyak aktivitas perekonomian yang terhambat dan bahkan dihentikan guna menghindari penyebaran virus Covid-19. Pasca situasi mulai membaik, ditandai dengan laju perkembangan kasus infeksi virus Covid-19 yang dapat dikendalikan, pemerintah mulai mengupayakan pemulihan perekonomian nasional melalui implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, peraturan tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diterapkan oleh pemerintah, bertujuan untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat serta memulihkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan, pemulihan ekonomi dilakukan dimulai dari kalangan rumah tangga masyarakat yang dianggap rentan, kemudian sektor usaha kecil, mikro dan menengah (Nafiati, 2020). Dengan adanya penerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional, diharapkan dapat menstimulasi aktivitas perekonomian masyarakat yang sebelumnya terdampak pandemi. Pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat kemudian menstimulasi pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan perekonomian yang telah terstimulasi, hal ini kemudian dapat mencegah Indonesia memasuki masa resesi ekonomi, yang kemudian dapat mempersulit upaya pemulihan kondisi pasca terdampak pandemi.

Dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, selain dengan menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah Indonesia juga melakukan kerja sama dengan negara lain maupun lembaga internasional guna mendapatkan bantuan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Upaya tersebut juga merupakan upaya untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi dikarenakan APBN yang telah banyak digunakan untuk kebutuhan penanganan pandemi sehingga terdapat keterbatasan penggunaan APBN untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Apabila penggunaan APBN ini dipaksakan, maka dapat berpotensi menyebabkan terjadinya resesi ekonomi.

Beberapa lembaga internasional yang menjadi mitra kerja sama Indonesia untuk mendapatkan bantuan ekonomi yang digunakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional diantaranya adalah International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Pada masa pandemi Covid-19, IMF memberikan bantuan kepada negara-negara anggota yang terdampak pandemi Covid-19 dalam bentuk Hak Penarikan Khusus (*Special Drawing Right*). Hak Penarikan Khusus adalah aset cadangan internasional yang dibuat oleh IMF untuk melengkapi cadangan resmi negara-negara anggotanya. Pemberian Hak Penarikan Khusus bertujuan untuk membantu negara yang membutuhkan cadangan dana, pemberian bantuan tersebut diberikan dalam jangka panjang, dan bantuan tersebut bukan dalam bentuk pinjaman (Kurniawan, 2022).

Pada tahun 2021, IMF memutuskan untuk menyalurkan sejumlah \$650 miliar Hak Penarikan Khusus, dimana alokasi tersebut akan memberikan keuntungan bagi negara-negara anggota untuk memenuhi kebutuhan cadangan keuangan dalam jangka panjang, membangun kepercayaan, membentuk ketahanan dan stabilitas ekonomi global, sekaligus membantu upaya mengatasi dampak Covid-19 (Saputra & Alaydrus, 2021). Hak Penarikan Khusus tersebut juga diberikan kepada negara-negara anggota G20 termasuk Indonesia (Laucereno, 2022).

Bank Dunia ikut aktif dalam memberikan bantuan kepada Indonesia sejak awal masa pandemi untuk mendukung penanganan pandemi dan upaya pemulihan ekonomi. Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar \$250 juta untuk program *Indonesia Covid-19 Emergency Response* dimana pendanaan tersebut digunakan untuk pengadaan perlengkapan fasilitas dan alat kesehatan guna mengurangi risiko penyebaran, peningkatan kemampuan deteksi, dan peningkatan kemampuan tanggap pandemi (Bank Dunia, 2020). Selain itu, Bank Dunia juga memberikan bantuan pendanaan lainnya seperti bantuan pendanaan sebesar \$500 juta untuk mempercepat vaksinasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pinjaman sebesar \$400 juta untuk mendukung kekuatan sistem keuangan domestik, dan pinjaman sebesar \$800 juta untuk membantu pemulihan ekonomi (Said, 2021).

Selain mengadakan kerja sama untuk mendapatkan bantuan dari lembaga internasional, Indonesia juga turut melakukan diplomasi dengan negara-negara mitra untuk mendapatkan bantuan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Australia sebagai salah satu negara mitra ikut aktif dalam memberikan bantuan kepada Indonesia selama masa pandemi. Pada tahun 2020-2021, Australia memberikan bantuan pembangunan resmi sekitar \$4 miliar, memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman sebesar AUD 1,5 miliar untuk mendukung ketahanan ekonomi Indonesia, memberikan bantuan peralatan medis dan vaksin sebesar 2,5 juta dosis vaksin (Rachmania, 2021). Selain itu, pemerintah Indonesia berupaya untuk memperkuat kerja sama bilateral dengan beberapa negara mitra untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi seperti dengan Singapura, Meksiko, dan Qatar (Setneg, 2022; Kemlu, 2020; Prihatin, 2021).

Diplomasi Indonesia dalam Pembentukan Tata Kelola Penanganan Pandemi Di Masa Depan

Selain praktik diplomasi untuk mendapatkan bantuan untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia beserta penanggulangan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian nasional, penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah Indonesia melakukan praktik diplomasi untuk membentuk solidaritas global dalam penanganan ancaman pandemi. Selama masa pandemi, Indonesia tidak hanya menjadikan diplomasi sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan internasional yang dibutuhkan untuk mendukung penanganan pandemi di Indonesia dan upaya pemulihan ekonomi nasional pasca terdampak pandemi, namun juga digunakan sebagai sarana untuk membentuk tatanan global dalam penanganan pandemi melalui pembentukan *Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response* (PPR-FIF).

Gagasan pembentukan *Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response* dikemukakan pada masa Presidensi Italia pada Forum G20 di tahun 2021. G20 membentuk Panel Independen Tingkat Tinggi di tahun 2021 yang berfungsi untuk menemukan solusi guna membiayai kepentingan global untuk kesiapsiagaan dan respons pandemi. Panel tersebut ditugaskan untuk menilai sistem pembiayaan yang telah ada/berjalan dan mengusulkan solusi yang layak untuk kebutuhan jangka panjang (MEF, 2021). Pada April 2021, Panel memberikan nota kemajuan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara anggota G20 dimana dokumen nota kemajuan tersebut menyoroti sistem pendanaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap pandemi harus diakui oleh komunitas internasional sebagai barang publik. Hal ini dikarenakan penyebaran virus Covid-19 yang telah melewati batas-batas negara (MEF, 2021).

Pada bulan Juli 2021, panel juga menyerukan tata kelola global dan mekanisme pembiayaan yang akan mendukung institusi yang ada, termasuk WHO. Panel menyerukan peningkatan pendanaan publik setidaknya \$75 miliar selama lima tahun ke depan, atau sekitar \$15 miliar per tahun (Stein & Sellers, 2021). Pada Oktober 2021, pemimpin G20 mengumumkan rencana untuk membentuk badan baru untuk mengoordinasikan

tanggapan pemerintah dunia terhadap pandemi internasional berikutnya dimana pembentukan badan baru tersebut dilatarbelakangi oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang telah mengungkap kekurangan kemampuan dunia untuk mengoordinasikan tanggapan negara-negara atas fenomena pandemi global (Strupczewski & Shalal, 2021).

Pada April 2022, negara-negara G20 untuk sementara telah setuju untuk menyiapkan dana global untuk kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Dana tersebut ditempatkan di Bank Dunia, dimana Indonesia dan Amerika Serikat selaku negara yang mendorong adanya gagasan pembentukan dana global tersebut (Reuters, 2021). Jajaran Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui gagasan pembentukan *Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response* untuk kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Dana tersebut akan melengkapi pembiayaan dan dukungan teknis yang diberikan oleh Bank Dunia, memanfaatkan keahlian teknis yang kuat dari WHO, dan melibatkan organisasi kunci lainnya dalam penanganan pandemi (World Bank, 2022). *Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response* pada akhirnya secara resmi diluncurkan pada Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022 yang ditandai dengan adanya komitmen bersama negara-negara anggota G20 untuk mempersiapkan dunia menghadapi ancaman pandemi di masa yang akan datang (Limanseto, 2020).

Selain sebagai inisiator, Indonesia juga berperan penting dalam penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan dana *Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response*. Negara-negara G20 menargetkan untuk mendapat dana sejumlah \$1,5 miliar pada tahun 2022 guna memenuhi kebutuhan pendanaan. Bank Dunia dan WHO memperkirakan dalam sebuah laporan bahwa jumlah pendanaan tahunan yang dibutuhkan untuk kesiapsiagaan menghadapi pandemi adalah sebesar \$10,5 miliar (Widianto & Lamb, 2022).

Pada awalnya, terdapat empat belas negara anggota G20 dan tiga negara undangan G20 yang telah secara resmi berkomitmen untuk berkontribusi sebagai pendonor, dengan jumlah pendanaan yang telah terkumpul sekitar \$1,4 miliar (Puspasari, 2022). Pada Presidensi G20 Indonesia, jumlah negara pendonor bertambah menjadi sembilan belas negara dan tiga organisasi filantropi yang telah berkomitmen untuk menjadi pendonor.

Penambahan jumlah tersebut tidak terlepas dari keberhasilan peran Presidensi Indonesia dalam Forum G20 tersebut (Administrator, 2022). Dengan bertambahnya jumlah pendonor, maka semakin mempermudah upaya untuk memenuhi kebutuhan dana yang dibutuhkan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keaktifan Indonesia dalam membentuk *Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response* sebagai upaya Indonesia dalam menunjukkan “kewarganegaraan global yang baik” dengan menjadikan masalah pandemi sebagai permasalahan global yang harus dihadapi bersama melalui mekanisme multilateral. Sebagai negara yang masuk kedalam kategori negara kekuatan menengah, Indonesia dapat bebas dan aktif dalam menggalang solidaritas global untuk membentuk tata kelola pandemi secara global, sehingga dunia dapat memiliki kesiapan dan ketahanan dalam menghadapi ancaman pandemi yang dapat sewaktu-waktu terjadi. Keaktifan tersebut sekaligus menunjukkan arah diplomasi Indonesia di masa pandemi Covid-19 yang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk mendapatkan bantuan penanganan pandemi Covid-19 beserta penanggulangan dampak pandemi, namun juga berorientasi pada upaya mitigasi potensi pandemi di masa yang akan datang melalui pembentukan tata kelola pandemi secara global.

Keaktifan tersebut merupakan refleksi bagaimana Indonesia memanfaatkan forum internasional dalam lingkup multilateral, untuk menjadikan isu kesehatan, pandemi Covid-19, sebagai permasalahan global. Melalui keanggotaan dan Presidensi G20, Indonesia memosisikan diri sebagai sosok pemimpin yang menggalang solidaritas negara dari kelompok manapun untuk menciptakan aliansi untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan serupa. Keberhasilan pembentukan *Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response* secara tidak langsung juga merupakan refleksi keberhasilan Indonesia dalam menggunakan isu kesehatan untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara anggota G20 untuk menciptakan aliansi atau mekanisme multilateral untuk menangani permasalahan yang dianggap sebagai permasalahan bersama.

Kesimpulan

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menjadikan upaya diplomasi sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta penanggulangan dampak pandemi Covid-19 pada berbagai sektor. Praktik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19 dilakukan dalam tingkat bilateral bersama negara mitra serta dalam tingkat multilateral dengan memanfaatkan berbagai forum internasional maupun lembaga internasional. Sebagai negara dengan status sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia memiliki fleksibilitas dalam melakukan praktik diplomasi yang dilakukan dalam berbagai tingkatan dan berdiplomasi dengan berbagai mitra, baik negara mitra dengan status sebagai negara berkekuatan besar maupun mitra negara dengan status negara berkekuatan kecil guna mewujudkan kepentingan nasional.

Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia juga memanfaatkan forum internasional untuk menunjukkan kepemimpinan global Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah Indonesia melalui delegasinya, secara aktif menyerukan kesadaran kolektif terhadap ancaman penyebaran virus Covid-19. Pemerintah Indonesia juga aktif menyerukan pentingnya solidaritas global dalam penanganan pandemi virus Covid-19 sehingga terbentuk suatu tatanan global dalam penanganan pandemi. Keaktifan Indonesia dalam forum internasional bukan hanya dilihat sebagai bentuk kepemimpinan global, namun juga sebagai upaya untuk mewujudkan kepentingan nasional yang mendasari dilakukannya praktik diplomasi.

Praktik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berhasil membentuk berbagai bentuk kerja sama untuk memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 seperti bantuan obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan serta bantuan ekonomi yang dibutuhkan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi di Indonesia. Selain itu, praktik diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga berkontribusi penting dalam keberhasilan dalam membentuk kesadaran global terhadap ancaman pandemi yang kemudian menjadi dasar pembentukan solidaritas global dalam penanganan pandemi.

Daftar Pustaka

- Administrator (2022). Komitmen Nyata G20 Menanggulangi Pandemi.
<https://indonesia.go.id/kategori/kabar-g20/6043/komitmen-nyata-g20-menanggulangi-pandemi?lang=1>
- Bank Dunia (2020). Bank Dunia Menyetujui Pendanaan Tanggap Darurat COVID-19 di Indonesia. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2020/05/29/the-world-bank-approves-financing-for-indonesias-covid-19-coronavirus-emergency-response>
- BNPB (2020). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.
<https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional>
- Cooper, A.F & Dal, E.P (2016). Positioning the third wave of middle power diplomacy: Institutional elevation, practice limitations. *International Journal* 2016, Vol. 71(4) 516–528 DOI: 10.1177/0020702016686385
- Cooper, dkk (1993) *Relocating Middle Powers: Australia and Canada in a Changing World Order*, Vancouver: UBC Press.
- Djiwandono, P.I. (2015). *Meneliti itu Tidak Sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Ducharme, Jamie (2020). World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What That Means. <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/>
- Humas (2015). Inilah Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia 5 Tahun Ke Depan.
<https://setkab.go.id/inilah-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia-5-tahun-ke-depan/>
- Ihsanuddin (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- Jordaan, E. (2003). The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers. *Politikon: South African Journal of Political Studies*, 30 (1), halaman 165-181.

- Karana, K.S (2020). Kemenkes-UNICEF Tandatangani Kerja Sama Pengadaan Vaksin dan Obat yang Terjangkau. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/kemenkes-unicef-tandatangani-kerja-sama-pengadaan-vaksin-dan-obat-yang-terjangkau>
- Kemenkes (2020). Indonesia Pimpin Kerjasama Sektor Kesehatan ASEAN dalam Penanganan Covid-19. <http://p2p.kemkes.go.id/indonesia-pimpin-kerjasama-sektor-kesehatan-asean-dalam-penanganan-covid-19/>
- Kemlu (2020). Indonesia Dorong KTT Khusus ASEAN dan ASEAN Plus Three lawan COVID-19. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1190/berita/indonesia-dorong-ktt-istimewa-asean-dan-asean-plus-three-lawan-covid-19>
- Kemlu (2020). Mesin Diplomasi ASEAN Terus Bekerja Hadapi COVID-19. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1188/berita/mesin-diplomasi-asean-terus-bekerja-hadapi-covid-19>
- Kemlu (2021). Menlu RI sampaikan capaian politik luar negeri Indonesia 2020 dan prioritas diplomasi 2021. <https://kemlu.go.id/manama/en/news/10500/menlu-ri-sampaikan-capaian-politik-luar-negeri-indonesia-2020-dan-prioritas-diplomasi-2021>
- Kickbush, I & Liu, A (2022). Global health diplomacy—reconstructing power and governance. *Lancet* 2022; 399: 2156–66 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00583-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00583-9)
- Kominfo (2021). Indonesia Siap Kerja Sama Dengan Negara dan Pihak Mana pun Untuk Amankan Pasokan Vaksin. <https://covid19.go.id/p/berita/indonesia-siap-kerja-sama-dengan-negara-dan-pihak-mana-pun-untuk-amankan-pasokan-vaksin>
- Kurniawan, D (2022). G20 MENJEMBATANI IMPLEMENTASI IMF SPECIAL DRAWING RIGHTS. <https://bisnisindonesia.id/article/g20-menjembatani-implementasi-imf-special-drawing-rights>
- Laucereno, S.F (2022). Ada Dana Bantuan Rp 1.233 T dari IMF, Cek di Sini. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6349370/ada-dana-bantuan-rp-1233-t-dari-imf-cek-di-sini>
- Lemhannas (2021). Retno Marsudi: Diplomasi Kesehatan Jadi Salah Satu Prioritas

- Diplomasi Indonesia. <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1063-retno-marsudi-diplomasi-kesehatan-jadi-salah-satu-prioritas-diplomasi-indonesia>
- Limanseto, H (2021). Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat: Mulai Dari Dukungan Vaksin Hingga Peningkatan Neraca Perdagangan. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3138/kerja-sama-indonesia-amerika-serikat-mulai-dari-dukkungan-vaksin-hingga-peningkatan-neraca-perdagangan>
- Limanseto, H (2022). Luncurkan Pandemic Fund, Presidensi G20 Indonesia Dorong Prevention, Preparedness, and Response (PPR) Dunia Hadapi Pandemi di Masa Depan. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4727/luncurkan-pandemic-fund-presidensi-g20-indonesia-dorong-prevention-preparedness-and-response-ppr-dunia-hadapi-pandemi-di-masa-depan>
- MEF (2021). The G20 establishes a High Level Independent Panel on financing the Global Pandemic Preparedness and Response. <https://www.mef.gov.it/en/inevidenza/The-G20-establishes-a-High-Level-Independent-Panel-on-financing-the-Global-Pandemic-Preparedness-and-Response-00001/>
- MEF (2021). The G20 works on financing preparedness and response to future health challenges. https://www.dt.mef.gov.it/en/news/2021/g20_12052021.html
- Michaud, J & Kates, J (2013). Global health diplomacy: advancing foreign policy and global health interests. *Global Health: Science and Practice* March 2013, 1(1):24-28; <https://doi.org/10.9745/GHSP-D-12-00048>
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nafiati, N (2020). Melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Mari Bersama-sama Menggerakkan Roda Perekonomian Untuk Indonesia Lebih Baik. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/13298/Melalui-Program-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN-Mari-Bersama-sama-Menggerakkan-Roda-Perekonomian-Untuk-Indonesia-Lebih-Baik>
- Prihatin, I.U (2021). Indonesia dan Qatar Perkuat Kerjasama Pemulihan Ekonomi Setelah

- Pandemi. <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dan-qatar-perkuat-kerjasama-pemulihan-ekonomi-setelah-pandemi.html>
- Puspasari, R (2022). Siaran Pers: Pertemuan Perdana Dewan Pengelola Dana Perantara Keuangan untuk Pandemi (PPR-FIF) dalam Presidensi G20 Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Dewan-Pengelola-Dana-Perantara-Kuangan>
- Rachmania, M (2021). Diskusi Bulanan DIHI UGM: Hubungan Australia-Indonesia di Era Pandemi COVID-19. <https://hi.fisipol.ugm.ac.id/berita/diskusi-bulanan-dihi-ugm-hubungan-australia-indonesia-di-era-pandemi-covid-19/>
- Reuters (2021). G20 agrees to set up global pandemic preparedness fund. <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/g20-agrees-set-up-global-pandemic-preparedness-fund-2022-04-21/>
- Said, A.A (2021). Bank Dunia Beri Utang ke Negara Berkembang Rp 2.284 T Selama Pandemi. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/60fe53bdf2e75/bank-dunia-beri-utang-ke-negara-berkembang-rp-2284-t-selama-pandemi>
- Saputra, D & Alaydrus, H (2021). Menelusuri Jejak Dana Bantuan IMF di Indonesia. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210907/9/1439093/menelusuri-jejak-dana-bantuan-imf-di-indonesia>
- Schoeman, Maxi (2003) 'South Africa as an Emerging Middle Power, 1994–2003', in Daniel, John, Habib, Adam and Southall, Roger (eds.) State of the Nation: South Africa 2003–2004, Cape Town: HSRC Press, halaman 349–367.
- Setneg (2022). Presiden Jokowi Bahas Upaya Penguatan Kerja Sama Pemulihan Ekonomi dengan PM Singapura. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_bahas_upaya_penguatan_kerja_sama_pemulihan_ekonomi_dengan_pm_singapura
- Setyowati, H.E (2020). Negara G20 Sepakat Dorong Kerja Sama Pengembangan Vaksin dan Obat Covid-19. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/400/negara-g20-sepakat-dorong-kerja-sama-pengembangan-vaksin-dan-obat-covid-19>
- Stein, J & Sellers, F.S (2021). G-20 announces new global body to respond to future pandemics, but stops short of committing funds.

<https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/10/29/g20-finance-pandemic-threat/>

Strupczewski, J & Shalal, A (2021). G20 wants 70% of world vaccinated by mid-2022, sets up pandemic task force. <https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/g20-want-70-world-vaccinated-by-mid-2022-set-up-task-force-pandemic-fight-2021-10-29/>

WHO (2020). UNDP, WHO dan IOM menyediakan ventilator untuk mendukung Respon COVID-19 Indonesia. <https://www.who.int/indonesia/news/detail/01-06-2020-undp-who-dan-iom-menyediakan-ventilator-untuk-mendukung-respon-covid-19-indonesia>

Widjanarko, O (2020). INDONESIA DORONG KERJA SAMA INTERNASIONAL MENGATASI DAMPAK PANDEMI COVID-19. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_223220.aspx

Widianto, S & Lamb, K (2022). G20 targets raising \$1.5 billion for global pandemic fund, says host Indonesia. <https://www.reuters.com/world/g20-targets-raising-15-bln-global-pandemic-fund-says-host-indonesia-2022-06-17/>

World Bank (2022). World Bank Board Approves New Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response (PPR). <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/30/-world-bank-board-approves-new-fund-for-pandemic-prevention-preparedness-and-response-ppr>